

KEMBALI KE PERTANIAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI RIAU (Upaya Mengembalikan Kemandirian Masyarakat Pedesaan)

Agus Sutikno, SP., M.Si.¹ dan Ahmad Rifai, SP., MP²

(1) Pembantu Dekan IV Fakultas Pertanian Universitas Riau

(2) Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

1. ALAS KATA

K2I diminta Fokus ke Pertanian, begitu judul berita yang menarik pada *Riau Pos* Kamis 26 Juli 2007, halaman 24. Adalah salah seorang anggota DPR RI asal pemilihan Riau Azwar Ches Putra mengemukakan hal tersebut. Suatu hal yang sangat tepat jika pemikiran tersebut dapat dirumuskan dalam implementasi pembangunan Riau ke depan. Komitmen tersebut sudah dicetuskan melalui penetapan Rencana Strategis Provinsi Riau 2004-2008, yang mengarahkan kembali pembangunan Riau ke pertanian.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam mengembalikan prioritas pembangunan Riau kembali ke pertanian. Salah satunya adalah tidak tepat menjadikan sektor industri sebagai *leading sector* pasca lepasnya Batam dari bahagian Provinsi Riau setelah terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Secara nasional revitalisasi sektor pertanian juga menjadi satu poin penting dalam arah pembangunan nasional. Paling utama adalah karena potensi pertanian yang dimiliki Riau menjadi modal dasar pembangunan ekonomi daerah.

Cukup banyak alasan menjadikan sektor pertanian sebagai sektor utama dalam pembangunan Riau. Indikator ekonomi makro Riau menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian semakin penting, yang ditunjukkan oleh kinerja sektor pertanian dengan perkembangan yang semakin baik, dengan pertumbuhan sebesar 6,37% pada periode 2000-2004, dan memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap total PDRB Riau, yaitu dari 14,01% pada tahun 2000 menjadi sebesar 16,59% tahun 2004. Peran penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi Riau juga ditunjukkan oleh banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian, yaitu sebanyak 996.371 orang (47,72%) penduduk Riau yang berusia 10 tahun ke atas (BPS, 2005). Sejalan dengan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi maka kegiatan jasa-jasa dan usaha berbasis pertanian (agribisnis) semakin meningkat. Artinya penduduk yang menyandarkan kehidupannya pada sektor pertanian juga semakin banyak.

Hasil pendataan penduduk/rumah tangga miskin di Provinsi Riau pada tahun 2004 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebanyak 1.008.163 jiwa atau 22,19%, atau sama dengan 231.508 rumah tangga miskin (23,68%). Lapangan usaha yang banyak dikerjakan oleh penduduk miskin di pedesaan adalah sektor pertanian/perkebunan yaitu sebanyak 50,7% dari seluruh

rumah tangga miskin. Konsentrasi penduduk miskin yang bekerja dibidang pertanian/perkebunan terbanyak ditemukan di Kabupaten Kuantan Singingi (90,3%), diikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu (71,0%), Bengkalis (70,8%), Indragiri Hilir (60,2%), Pelalawan (55,3%) dan Indragiri Hulu (55,1%).

2. KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA PETANI RIAU

Karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan data Balitbang Riau, 2004 menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan penduduk miskin usia produktif (15-55 tahun) di Provinsi Riau rata-rata tamat SD (48,0%), tamat SLTP sederajat 21,8%, tamat SLTA sederajat 11,0%, dan masih terdapat yang tidak tamat SD sebanyak 14,1% dan tidak pernah sekolah 4,8%. Hal ini mengindikasikan kapasitas sumberdaya manusia penduduk miskin usia produktif sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan juga digambarkan oleh masih tingginya persentase penduduk miskin yang buta huruf yaitu rata-rata 5,1%.

Kepemilikan aset produktif rumah tangga miskin juga masih tergolong rendah, hal ini terlihat dari kepemilikan lahan sawah pada umumnya dibawah 0,5 ha. Rumah tangga miskin yang memiliki aset sawah sebanyak 4,2% dari seluruh rumah tangga miskin di Provinsi Riau. Dari rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan sawah sebanyak 37,6% memiliki aset lahan sawah dibawah 0,5 ha, dan 62,4% memiliki aset lahan sawah di atas 0,5 ha.

Rumah tangga miskin juga memiliki aset tanaman perkebunan, namun pada umumnya kepemilikan aset tanaman perkebunan masih dibawah batas minimum usaha. Artinya tanaman perkebunan yang dimiliki tersebut belum layak diusahakan sebagai sumber pendapatan karena luasan dan jumlah tanamannya sangat kecil. Dapat dilihat bahwa rumah tangga miskin yang memiliki aset tananaman karet sebanyak 11,2% dari total rumah tangga miskin di Provinsi Riau, sebanyak 55,4% diantaranya memiliki aset tanaman kelapa di bawah jumlah batas minimum usaha (di bawah 150 pohon). Sebanyak 12,3% rumah tangga miskin memiliki aset tanaman kelapa sawit, diantaranya 59,7% memiliki aset tanaman kelapa sawit dibawah batas minimum usaha (dibawah 15 pohon), dan sebanyak 15,3% rumah tangga miskin memiliki aset tanaman kelapa, dimana 72,6% dalam jumlah dibawah batas minimum usaha (dibawah 25 pohon).

Hal yang sama juga terjadi pada kepemilikan aset ternak (besar, kecil maupun unggas). Sebanyak 0,4% rumah tagga miskin memiliki ternak kerbau, diantaranya sebanyak 69,7% dengan kepemilikan dibawah batas minimum usaha (sampai dengan 2 ekor), sebanyak 2,2% memiliki aset ternak sapi, diantara 71,1% dibawah batas minimum usaha (sampai dengan 2 ekor), sebanyak 1,9% memiliki aset ternak kambing, diantaranya 82,9% dibawah batas minimum usaha (sampai dengan 6 ekor), dan sebanyak 24,2% memiliki ternak itik/ayam, diantaranya 84,5% dibawah batas minimum usaha (sampai dengan 15 ekor).

Selain itu, usaha pertanian di pedesaan yang pada umumnya dilakukan oleh rumah tangga miskin adalah terbatasnya akses teknologi, kurangnya kepemilikan teknologi, dan rendahnya kemampuan penggunaan teknologi. Masalah lain adalah pemasaran, yang digambarkan oleh saluran pemasaran yang panjang, dan banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat sehingga penentuan harga kurang transparan, yang berakibat pada rendahnya harga yang diterima petani. Hal ini disebabkan lemahnya kapasitas lembaga petani dan lembaga ekonomi pedesaan.

3. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Menjadikan sektor pertanian sebagai sektor basis di Riau, tentunya berharap sektor pertanian dapat menjadi penggerak perekonomian Riau ke depan. Dalam pemahaman ekonomi neo-klasik, menjadikan suatu sektor sebagai basis pembangunan ekonomi, mengharapkan munculnya efek pengganda (*multiplier effect*), sehingga diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi yang lebih luas, memberikan sumbangan dalam pengganda pendapatan (*income multiplier*) dan pengganda tenaga kerja (*employment multiplier*).

Tantangan besar untuk melaksanakan strategi pembangunan pertanian Riau adalah seberapa besar perhatian dan komitmen pemerintah memberikan proporsi anggaran yang cukup bagi pembangunan pertanian. Tantangan berikutnya adalah kuatnya dominasi birokrasi pada penyusunan program-program yang berkaitan dengan pembangunan pertanian, sehingga landasan strategis dan filosofis dikhawatirkan akan tereduksi menjadi kegiatan proyek pembangunan yang administratif, yang pada akhirnya misi pembangunan pertanian dalam penanggulangan kemiskinan dan penumbuhan ekonomi Riau tidak tercapai.

Oleh sebab itu, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- a) Penyusunan *blue print* pembangunan pertanian Riau yang dipilah dalam dua bahagian, yaitu bahagian yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan bahagian yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan;
- b) Melakukan sinkronisasi program antar satuan kerja yang berkaitan dengan pertanian (dinas tanaman pangan, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, perkebunan, dan ketahanan pangan) dan satuan kerja pendukung lain, dengan mengedepankan konsep *integrated farming system*, dan bukan konsep bekerja sektoral atau parsial; dan
- c) Revitalisasi lembaga penyuluhan pertanian yang terintegrasi.

Agar pembangunan pertanian memiliki daya ungkit yang lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan, maka penumbuhan dan pengembangan agroindustri pedesaan sangat diperlukan, karena kegiatan ini dapat menjadi sumber *multiflier effect* dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan

pendapatan rumah tangga petani melalui peningkatan nilai tambah. Hal penting yang juga perlu menjadi perhatian adalah perbaikan struktur pasar komoditi pertanian, dengan penguatan lembaga petani dan lembaga ekonomi desa. Satu hal yang potensial dikembangkan adalah membangun jejaring sub-pasar lelang komoditi agro di sentra-sentra produksi pertanian, untuk memperluas akses pasar produksi yang lebih transparan.

4. KONDISI KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN RIAU

Sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal dengan ciri mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos kerja, disiplin dan moral yang tinggi serta berwawasan global, diperlukan dalam membangun sektor pertanian, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian lain akan mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM pertanian (terutama SDM petani di pedesaan), adalah peningkatan kualitas kegiatan penyuluhan pertanian. Melalui penyuluhan pertanian dapat dibangun kegiatan usaha pertanian yang baik (*better farming*), yang mampu memperbaiki kegiatan usaha pertanian (*better business*), sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani (*better living*).

Kondisi kelembagaan penyuluhan pertanian di Provinsi Riau saat ini sangat beragam dan kurang terkoordinasi, karena kurangnya *political will* pemerintah daerah dalam penataan kelembagaan penyuluhan pertanian. Berdasarkan data Departemen Pertanian tahun 2003 dapat dilihat bahwa status kelembagaan penyuluhan tidak dikoordinasikan dalam suatu kelembagaan yang tertata. Kabupaten Rokan Hulu menempatkan penyuluh pertanian dalam jabatan fungsional yang ditempatkan disetiap dinas yang terkait dengan pertanian, demikian juga di Kota Dumai, Indragiri Hilir, dan Pelalawan dengan status sub dinas, di Rokan Hilir dan Kuantan Singingi dengan status Seksi Penyuluhan dalam satuan kerja yang terkait dengan pertanian, dan di Kampar dan Kota Pekanbaru di kelompokkan dalam bentuk Kantor Informasi Penyuluhan dan Kantor Pelayanan Terpadu.

Gambaran kelembagaan penyuluhan yang demikian menunjukkan bahwa lembaga penyuluh pertanian berada tersebar pada berbagai satuan kerja. Kondisi ini tentu melemahkan peranan penyuluh pertanian dalam mendukung pembangunan sektor pertanian. Apalagi, paradigma pelaksanaan program dan kegiatan yang masih ego-sektoral (dinas), menjadikan kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan secara sendiri-sendiri.

Berdasarkan data Sensus Pertanian 2003 terdapat 478.920 rumah tangga pertanian di Riau, yang bila dipilah berdasarkan jenis usaha pertanian yang dilakukan terdapat 68,55% memiliki usaha perkebunan, sebanyak 32,81% memiliki usaha padi/palawija, sebanyak 26,03% memiliki usaha hortikultura, sebanyak 15,81% memiliki usaha ternak, dan sebanyak 5,21% memiliki usaha perikanan, serta masih usaha-usaha bidang pertanian lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa petani di pedesaan

tidak menggantungkan hidup pada tanaman pangan saja, tetapi juga kepada kebun, kolam ikan, dan ternak.

Berdasarkan karakteristik usaha pertanian yang dimiliki petani dan bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian yang dibentuk parsial berdasarkan sub-sektor, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, dan Badan Ketahanan Pangan, akan sulit membentuk koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang mampu membantu petani dalam meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan kualitas usaha petani yang beragam tersebut.

5. KELEMBAGAAN PENYULUHAN TERPADU

Sampai saat ini, kelembagaan khusus yang menangani penyuluhan pertanian di Provinsi Riau tidak ada, tetapi fungsi penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup pertanian. Bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian yang beragam (parsial dan tidak terkoordinasi) pada setiap Kabupaten/Kota merupakan gambaran beragamnya persepsi pemerintah daerah terhadap peran strategis kelembagaan penyuluhan pertanian di dalam mendukung pembangunan pertanian. Bercermin pengalaman masa lalu, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berfungsi optimal sebagai basis (*homebase*) penyuluhan pertanian. Saat ini peran BPP mengalami penurunan seiring dengan melemahnya kelembagaan penyuluhan ini.

Intervensi Pemerintah Provinsi untuk mengatur bentuk dan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota memang tidak memungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun penetapan sektor pertanian sebagai basis pembangunan ekonomi Riau, memerlukan adanya revitalisasi kelembagaan penyuluhan pertanian, dengan membentuk suatu kelembagaan penyuluhan terpadu yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. FAO dalam *Special Program for Food Security (SPFS)* yang salah satunya diimplementasikan di Kabupaten Rokan Hulu, telah memperkenalkan model penyuluhan terpadu, dimana organisasi pelaksanaannya terdiri dari tenaga-tenaga penyuluh pertanian dari berbagai sub-sektor, sehingga secara efektif dapat mengatasi persoalan yang dihadapi petani dan keluarganya. Model ini merupakan perubahan paradigma penyuluhan sektoral dan parsial, menjadi paradigma penyuluhan terpadu yang dapat melayani kebutuhan keluarga pertanian, tidak hanya membantu persoalan teknis tetapi juga meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan petani (ekonomi dan sosial).

Revitalisasi kelembagaan penyuluhan pertanian harus dimulai dari pengaturan struktur dan kelembagaan penyuluhan pertanian, sehingga peran strategis penyuluh pertanian dalam pembangunan pertanian dapat ditingkatkan. Oleh sebab itu, langkah konkrit yang perlu dilakukan adalah memperjelas hubungan antara kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga struktur dan mekanisme pembinaan dan tata hubungan kerja antar lembaga penyuluhan menjadi jelas. Bentuknya dapat berupa BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) yang didirikan di setiap Kabupaten/Kota

dengan pembinaan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota bersangkutan. Harapannya, kelembagaan penyuluhan yang baik, akan dapat menjadi motor penggerak pembangunan pertanian yang merupakan pemberdayaan masyarakat sebagai leading sektor pembangunan Riau, yang tentunya sangat berkaitan erat dengan percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM (khususnya pertanian di pedesaan).

6. DAFTAR RUJUKAN

- Balitbang Provinsi Riau. 2004. *Pendataan Penduduk/Keluarga Miskin Provinsi Riau*. Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru.
- BPS. 2006. *Riau Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Riau, Pekanbaru.
- BPS. 2004. *Sensus Pertanian 2003*. Badan Statistik Riau, Pekanbaru.
- KPK Pusat. 2004. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional*. KPK Pusat, Jakarta.
- KPK Provinsi Riau. 2004. *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau*. KPK Provinsi Riau, Pekanbaru.
- Riau Pos*. 2007. *K2I diminta Fokus ke Pertanian*, *Riau Pos* Edisi Kamis 26 Juli 2007, halaman 24., Pekanbaru

